



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14(1), 35-48



RESEARCH ARTICLE

Dari Impor Hingga Diversifikasi: Analisis Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Krisis Global 2007-2008

Eko Wahyu Junaidi¹, Nugra Irianta Denashurya², Singgih Atmojo², Fathimah
Dayaning Pertiwi³, Dimas Aldi Pangestu⁴

¹Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Tanjungpura

²Agribisnis, FAPERTA, Universitas Tanjungpura

³Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Mulawarman

⁴Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

Corresponding Author: Eko.wahyu.junaidi@fkip.untan.ac.id

To cite this article: Junaidi, E. W., et.al. (2025). Respon Indonesia terhadap krisis pangan global pada 2007-2008. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(1), 35-48. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.81826>.

Abstract

The global food crisis of 2007–2008 significantly impacted food price stability in various countries, including Indonesia. This article aims to analyze the strategies implemented by the Indonesian government in response to the crisis to safeguard national food security. The study adopts a historical approach, employing Kuntowijoyo's historical method, which includes several stages: heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The analysis reveals that the Indonesian government implemented several measures such as rice imports, the distribution of subsidies through the raskin (rice for the poor) program, and food diversification campaigns to reduce dependency on rice. While these strategies were relatively effective in mitigating short-term impacts, ongoing challenges remain, particularly in terms of import dependency and unequal distribution. Therefore, food security policies in Indonesia require strengthening of the domestic agricultural sector and continuous evaluation to establish a sustainable and inclusive food system.

Abstrak

Krisis pangan global yang terjadi pada 2007-2008 berdampak signifikan bagi kestabilan harga pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah Indonesia untuk merespon krisis tersebut guna menjaga ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode historis oleh Kuntowijoyo. Hal ini mencakup beberapa tahapan, seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi seperti impor beras, penyaluran subsidi melalui skema program raskin dan kampanye diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras. Meskipun strategi yang digunakan cukup efektif untuk meredam dampak jangka pendek, ketergantungan akan impor dan distribusi yang belum merata tetap menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia membutuhkan penguatan pada sektor pertanian domestik dan evaluasi berkelanjutan guna menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Article Info

Article History:
Received 26 Mart 2021
Revised 1 April 2025
Accepted 25 April 2025
Available online 25 April 2025

Keyword:

Crisis; Food Subsidies; Food Security Indonesia; Rice Imports.

Kata Kunci:

Impor Beras; Ketahanan pangan; Krisis Pangan; Program Raskin; Subsidi.

PENDAHULUAN

Krisis pangan di seluruh dunia yang terjadi pada 2007-2008 adalah salah satu kejadian penting dalam sejarah ekonomi global, memberikan pengaruh luas pada negara-negara berkembang. Krisis ini dipicu oleh pertemuan faktor-faktor yang saling berhubungan, termasuk kondisi meteorologi yang parah, meningkatnya biaya energi, dan peraturan perdagangan internasional yang berdampak pada ketersediaan pangan. Perubahan iklim, yang memicu kekeringan berkepanjangan di banyak daerah penghasil pangan yang signifikan, mengurangi output pertanian, terutama untuk komoditas seperti gandum dan jagung (Farouk & Cliche, 2012). Selain itu, melonjaknya harga energi, terutama harga minyak mentah, meningkatkan biaya produksi pangan secara global, yang kemudian berkontribusi pada eskalasi harga pangan di seluruh dunia (Golay, 2010).

Keadaan ini ditambah peraturan ekspor-impor yang dilembagakan oleh negara-negara penghasil makanan memperburuk keadaan. Negara-negara penghasil makanan terkemuka tertentu, seperti India dan Vietnam, memberlakukan pembatasan ekspor beras dan gandum untuk melindungi sumber daya domestik mereka. Strategi ini mengakibatkan kekurangan di pasar internasional dan memicu lonjakan besar dalam harga pangan global (Farouk & Cliche, 2012). Salah satu dampak paling signifikan dari krisis adalah kenaikan harga pangan yang mencolok, yang berpuncak pada inflasi pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2008, harga beras internasional meningkat lebih dari 50%, sementara harga jagung dan gandum juga melonjak tajam selama jangka waktu ini (Sundaram, 2013).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi melebihi 230 juta orang pada saat itu, sangat rentan terhadap konsekuensi dari krisis pangan global ini. Mayoritas orang Indonesia bergantung pada makanan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai, yang harganya dipengaruhi oleh tren pasar

internasional. Selama periode 2007-2008, Indonesia menyaksikan kenaikan harga pangan yang substansial. Data Badan Statistik Pusat (BPS) menunjukkan bahwa harga beras melonjak sekitar 40% pada tahun 2008, sementara makanan lain seperti minyak goreng, jagung, dan kedelai juga menghadapi peningkatan harga yang signifikan. Dampak dari lonjakan harga ini memberikan tekanan besar pada daya beli konsumen, terutama di kalangan demografi berpenghasilan rendah (Ghuri, 2009).

Selain tantangan yang ditimbulkan oleh harga pangan, Indonesia juga menghadapi hambatan signifikan terkait ketergantungannya pada impor produk makanan tertentu. Negara ini mengimpor beras, jagung, dan kedelai dalam jumlah besar dari sumber asing untuk memenuhi permintaan konsumsi domestik. Ketergantungan ini menjadi masalah ketika harga pangan internasional melonjak, mengurangi kapasitas Indonesia untuk membeli makanan dengan biaya yang wajar. Pemerintah Indonesia saat itu dihadapkan dengan dua tantangan utama: mempertahankan stabilitas harga pangan di ranah domestik dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua segmen populasi (Sharma, 2009).

Mengingat krisis pangan global ini, pemerintah Indonesia harus segera menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk dari melonjaknya harga pangan dan menegakkan ketahanan pangan nasional. Beberapa langkah yang dilakukan termasuk meningkatkan produksi pangan domestik, memfasilitasi akses ke impor pangan, dan mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pangan global dan memperkuat sektor pertanian domestik untuk meningkatkan ketahanan terhadap volatilitas harga internasional. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada 2007-2008 telah menjadi penting untuk mengamankan stabilitas pangan di masa depan, mengingat tantangan yang dihadapi

oleh negara dengan populasi besar dan sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar global (Setiawan et al., 2016).

Sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap krisis pangan global 2007-2008 dirancang dan dilaksanakan. Kajian ini berusaha untuk meneliti strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional selama krisis, terutama melalui kebijakan impor beras, subsidi pangan, dan inisiatif diversifikasi pangan. Memanfaatkan metodologi historis, penelitian ini menyelidiki kemanjuran kebijakan tersebut baik dalam jangka pendek maupun kontribusinya terhadap peningkatan berkelanjutan dari sistem pangan nasional.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, penyelidikan yang akan ditangani dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia bereaksi terhadap krisis pangan global 2007-2008? (2) Apa strategi utama yang digunakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional selama periode tersebut? (3) Sejauh mana strategi efektif dalam mengurangi dampak krisis dan membangun sistem pangan yang tangguh? Penyelidikan ini merupakan dasar untuk melakukan analisis kebijakan yang diberlakukan, serta dampaknya terhadap stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metodologi penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo (2001), mencakup fase yang meliputi: (1) pemilihan topik; (2) heuristik; (3) kritik sumber; (4) interpretasi; dan (5) historiografi. Pada penelitian ini, peneliti memilih topik respon Indonesia terhadap krisis pangan global pada tahun 2007-2008. Heuristik melibatkan pemanfaatan sumber primer dan sekunder, dimanifestasikan dalam bentuk buku dan jurnal akademik. Kritik sumber dilakukan

melalui penilaian internal dan eksternal, yang digunakan untuk memastikan keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh. Selanjutnya, interpretasi difasilitasi melalui penerapan data otentik dan kredibel, yang mengarah pada analisis dan sintesis. Akhirnya, informasi yang disintesis diartikulasikan dalam format historiografi.

Dalam upaya rekonstruksi historis dan pemahaman strategi pemerintah Indonesia selama krisis pangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu bantu, terutama dari ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Pendekatan ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan pangan dalam kerangka ekonomi makro dan konsekuensi sosiokulturalnya. Lensa ekonomi digunakan untuk memahami dampak fluktuatif harga pada kapasitas daya beli masyarakat, sementara pengawasan kebijakan publik digunakan untuk memeriksa bagaimana taktik seperti impor, subsidi, dan diversifikasi pangan dirumuskan dan dilaksanakan dalam paradigma pemerintahan nasional. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi interpretasi sejarah dan menjamin bahwa analisis yang dilakukan tidak semata-mata deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual.

PEMBAHASAN

1. Konteks Krisis Pangan Global 2007-2008

Penyebab Krisis Pangan Global

Krisis pangan adalah keadaan gangguan dalam aksesibilitas, pengadaan/akses, dan distribusi yang disebabkan oleh pertemuan tekanan ekstrinsik dan intrinsik, yang memberikan efek pada keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat (Lang, 2010). Krisis pangan global yang terjadi pada 2007-2008 dipicu oleh banyak faktor yang saling berhubungan dan ketegangan yang meningkat di pasar pangan internasional. Salah satu faktor utama adalah volatilitas harga energi, terutama harga minyak global yang meningkat secara dramatis. Pada pertengahan 2008, harga

minyak melonjak menjadi lebih dari \$140 per barel, yang memberikan pengaruh langsung pada biaya transportasi dan produksi pangan. Kenaikan harga energi berdampak pada biaya produksi pangan dalam skala global, karena banyak proses pertanian bergantung pada energi, baik untuk pemrosesan atau distribusi. Misalnya, biaya transportasi yang semakin selangit membuat makanan yang diproduksi di negara-negara pertanian utama lebih mahal pada saat mencapai pasar internasional (Farouk & Cliche, 2012).

Meningkatnya harga pupuk yang sangat bergantung pada harga energi juga berkontribusi signifikan terhadap krisis ini. Misalnya, biaya pupuk nitrogen, yang berfungsi sebagai bahan baku utama dalam produksi pangan, melonjak hampir 100% selama periode 2007-2008. Eskalasi ini meningkatkan biaya produksi bahan makanan, terutama komoditas nabati seperti gandum dan jagung. Meningkatnya biaya produksi mengurangi margin keuntungan petani dan menghasilkan hasil pertanian yang tidak proporsional dengan biaya produksi, sehingga membuat pengurangan pasokan tidak dapat dihindari di banyak negara penghasil pangan (Schmitz & Kavallari, 2009).

Selain faktor terkait energi dan biaya pupuk, perubahan iklim juga memainkan peran penting dalam krisis pangan ini. Negara-negara penghasil makanan terkemuka seperti Australia, Rusia, dan negara-negara di Afrika Sub-Sahara mengalami kekeringan parah yang secara substansif mengurangi hasil panen mereka. Misalnya, di Rusia, panen gandum pada tahun 2007 anjlok lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya karena kondisi kekeringan yang ekstrim. Sebaliknya, fenomena El Niño yang berdampak pada wilayah yang luas di Asia dan Amerika Selatan juga mempengaruhi produksi pangan, terutama mempengaruhi beras dan jagung, yang sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca yang drastis (Ploeg, 2010).

Selain itu, kebijakan mengubah lahan pertanian menjadi lahan yang ditujukan untuk biofuel semakin memburuk pasokan

pangan global. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil semakin mengalokasikan sebagian besar lahan pertanian mereka untuk membudidayakan tanaman penghasil bahan bakar hayati, seperti jagung untuk etanol. Konversi ini mengurangi areal yang sebelumnya digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti gandum dan kedelai, yang mengakibatkan pasokan pangan global yang semakin terbatas. Ketergantungan pada biofuel sebagai sumber energi terbarukan alternatif, sementara penting untuk mengurangi emisi karbon, telah terbukti memiliki dampak buruk yang cukup besar pada ketersediaan pangan (Gliessman, 2022).

Pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh negara-negara penghasil pangan juga telah mengintensifkan krisis pangan. Negara-negara seperti India dan Vietnam, yang menempati peringkat dua negara penghasil beras terbesar di dunia, memilih untuk membatasi ekspor beras untuk menjaga aksesibilitas pangan domestik mereka. Keputusan ini menyebabkan lonjakan harga pangan internasional, terutama untuk beras, memperburuk ketegangan di pasar global. Negara-negara yang bergantung pada impor beras, seperti Indonesia, mulai menghadapi tantangan dalam mengamankan pasokan beras dengan biaya yang wajar (Abbott & Borot de Battisti, 2011).

Konsekuensi Krisis Pangan di Indonesia

Krisis pangan global pada tahun 2007–2008 memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia. Meskipun negara ini merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan jumlah penduduk melebihi 230 juta jiwa, ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan beras sebagai komoditas pokok. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengimpor sekitar 1,2 juta ton beras guna mengatasi defisit pasokan di dalam negeri (BPS, 2007). Meskipun Indonesia terus berusaha untuk mencapai swasembada beras, ketergantungannya pada impor beras

membuat negara ini sangat rentan terhadap variasi harga pangan internasional.

Pada tahun 2008, peningkatan harga pangan global memiliki pengaruh langsung pada harga pangan domestik. Harga beras di pasar internal Indonesia melonjak lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal tahun 2008, harga beras di pasar tradisional Indonesia tercatat antara Rp 6.000-7.000 per kilogram, naik dari sekitar Rp 4.500-5.000 per kilogram pada tahun 2007. Selain beras, harga minyak goreng, gula, dan komoditas makanan lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, harga minyak goreng, yang sebelumnya sekitar Rp 7.000 per liter pada tahun 2007, melonjak menjadi Rp 9.500 per liter pada tahun 2008, naik hampir 30% (BPS, 2008).

Peningkatan harga pangan ini tidak hanya mempengaruhi inflasi tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2008 mencatat kenaikan sekitar 11%, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menggambarkan bagaimana dampak krisis pangan berkontribusi terhadap peningkatan inflasi di Indonesia (BPS, 2008). Hal ini mengakibatkan penurunan daya beli individu, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam keadaan ekonomi yang genting. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2008, krisis pangan ini menyebabkan sekitar 1,5 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan sebagai konsekuensi dari melonjaknya harga pangan, yang menjadi tidak terjangkau bagi banyak rumah tangga miskin.

Harga Pangan di Pasar dan Respon Masyarakat

Krisis pangan global juga tercermin dari lonjakan harga pangan yang diamati di pasar domestik Indonesia. Berdasarkan data BPS (2008), harga beras premium di pasar tradisional Indonesia mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram pada akhir tahun 2008, kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan harga beras pada tahun sebelumnya. Tidak

hanya beras, komoditas pangan lainnya seperti gula, kedelai, dan minyak goreng juga mencatat kenaikan harga yang sangat tajam.

Reaksi publik terhadap kenaikan harga pangan ini agak beragam. Sebagian besar keluarga dengan pendapatan rendah telah terpaksa membatasi konsumsi makanan tertentu, terutama protein hewani seperti daging dan ikan, karena meningkatnya biaya makanan pokok. Di daerah-daerah tertentu, ketegangan sosial mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi melonjaknya harga pangan. Beberapa kelompok masyarakat mengungkapkan keluhan mengenai kelangkaan makanan dan kenaikan harga, memaksa mereka untuk membuat pilihan antara membeli makanan atau barang-barang penting lainnya. Sebaliknya, ketahanan pangan di beberapa daerah semakin genting, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat distribusi pangan (Neilson & Arifin, 2013).

2. Keadaan Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2007-2008

Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Krisis Pangan

Sebagai reaksi terhadap krisis pangan ini, pemerintah Indonesia segera memberlakukan serangkaian strategi untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan dan menjamin ketersediaan pangan dalam negeri. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah untuk memfasilitasi impor beras, meskipun tujuan Indonesia mencapai swasembada beras. Pemerintah juga menambah peran Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengelola distribusi pangan ke daerah yang mengalami kekurangan. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan bantuan subsidi pangan kepada keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, termasuk melalui inisiatif Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) yang memperluas alokasinya. Inisiatif ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras bagi masyarakat kurang mampu dengan menyediakan akses ke beras bersubsidi (Faharuddin et al., 2022).

Pemerintah juga mendorong petani untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, melalui penyediaan subsidi pupuk dan peningkatan distribusi pangan dari daerah produksi ke pasar primer. Selain itu, strategi diversifikasi pangan juga dipromosikan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada beras. Konsumsi makanan asli seperti jagung, singkong, dan ubi dianjurkan untuk mengurangi dampak krisis pangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik.

Krisis pangan global 2007-2008 yang dipicu oleh meningkatnya harga energi, perubahan iklim, dan ketegangan pasar internasional membahayakan ketahanan pangan domestik Indonesia. Negara-negara yang terus bergantung pada impor untuk berbagai komoditas makanan penting, seperti beras, jagung, dan kedelai, harus segera bereaksi terhadap tantangan signifikan yang merusak stabilitas ekonomi dan sosial. Mengingat situasi genting ini, pemerintah Indonesia mengumumkan serangkaian strategi untuk melindungi pasokan pangan, menjaga daya beli individu, dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Selain tekanan dari pasar global, kondisi ketahanan pangan Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai bencana alam yang terjadi dalam rentang waktu sebelum dan setelah krisis pangan di seluruh dunia. Pada periode 2006-2009, Indonesia mengalami beberapa bencana yang signifikan seperti banjir di Jakarta dan wilayah Pantura (2007), peristiwa seismik di Sumatera Barat (2007), dan musim gersang di berbagai wilayah pertanian di Jawa dan Nusa Tenggara (2008). Fenomena ini memberikan pengaruh langsung pada produktivitas pertanian, gangguan pasokan logistik pangan, serta peningkatan angka kerentanan pangan di beberapa daerah. Gabungan dari faktor global dan lokal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia selama krisis tidak semata-mata dipengaruhi oleh dinamika internasional, tetapi juga oleh dinamika bencana domestik yang memperburuk ketidakstabilan sistem pangan nasional.

Inisiasi Impor Beras untuk Menjaga Aksesibilitas Pangan

Salah satu strategi utama yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah inisiasi saluran impor beras. Meskipun Indonesia memiliki kemampuan produksi beras yang besar, ketergantungan pada impor tetap ada, terutama untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Pada tahun 2008, terlepas dari upaya Indonesia untuk mencapai swasembada beras, pemerintah terpaksa mengizinkan impor beras untuk mengatasi kekurangan pasokan yang ditimbulkan oleh ketegangan di pasar internasional (BPS, 2008).

Indonesia didokumentasikan mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras pada tahun 2008 untuk mengurangi kekurangan pasokan pangan di pasar domestik. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia, produksi beras domestik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, terutama di daerah yang mengalami kekurangan produksi. Selain itu, kondisi iklim yang tidak dapat diprediksi pada tahun 2008 meningkatkan risiko terhadap produksi pangan, sehingga pemerintah mempertimbangkan pilihan impor sebagai sebuah langkah strategis untuk menjaga pasokan beras yang stabil (Kementerian Pertanian, 2008).

Bersamaan dengan itu, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga beras untuk menegakkan stabilitas pasar domestik. Dalam konteks ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) berperan proaktif dalam mengelola distribusi beras di pasar. Bulog muncul sebagai saluran vital dalam distribusi beras bersubsidi kepada masyarakat, terutama ke segmen miskin yang paling terpengaruh oleh kenaikan harga pangan. Pada tahun 2008, Bulog memprioritaskan distribusi beras ke daerah terpencil dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan pangan (Bulog, 2008). Bulog juga menambah cadangan beras untuk menjaga stabilitas harga, sehingga mencegah lonjakan harga di pasar (BPS, 2008).

Program Raskin dan Bantuan Subsidi Pangan untuk Kaum Miskin

Untuk melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari dampak melonjaknya harga pangan, pemerintah memperluas Program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin). Raskin mewakili salah satu strategi penting dalam memberikan makanan yang terjangkau kepada masyarakat yang paling kurang beruntung. Pemerintah Indonesia memperkuat kuota distribusi beras bersubsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah, di mana pada tahun 2008 sekitar 4 juta ton beras disebarluaskan melalui program tersebut, menguntungkan lebih dari 15 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia (BPS, 2008).

Program ini tidak hanya menekankan penyediaan bantuan beras bersubsidi tetapi juga memperkuat sistem distribusi pangan untuk memastikannya lebih ditargetkan. Pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mengawasi distribusi beras Raskin, memastikannya mencapai rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Dalam kasus tertentu, program ini juga dilaksanakan bersama dengan inisiatif bantuan makanan lainnya, seperti gula dan minyak goreng, untuk menjamin akses makanan yang lebih komprehensif (Kementerian Sosial, 2008).

Bantuan pangan bersubsidi seperti ini sangat penting, mengingat bahwa selama periode itu, inflasi pangan meningkat ke tingkat yang meningkat secara signifikan, dengan harga beras melonjak sebanyak 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut statistik Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2008, harga beras premium di pasar tradisional mencapai sekitar Rp 8.000 per kilogram, padahal sebelumnya sekitar Rp 5.500 per kilogram. Bagi individu yang kurang beruntung secara ekonomi, eskalasi harga semacam itu menimbulkan tantangan yang cukup besar, dengan demikian, program Raskin muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli dan mencegah tingkat kemiskinan yang lebih dalam (BPS, 2008).

Subsidi Pupuk dan Dukungan untuk Petani Lokal

Untuk merangsang produksi pangan dalam negeri, pemerintah Indonesia juga memberikan subsidi pupuk dan dukungan kepada petani. Salah satu kendala utama yang dihadapi petani pada tahun 2008 adalah kenaikan harga pupuk, yang secara langsung berdampak pada biaya produksi mereka. Untuk mengurangi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan subsidi pupuk yang cukup besar, sebesar sekitar 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani di seluruh Indonesia (Kementerian Pertanian, 2008).

Inisiatif subsidi pupuk ini diantisipasi untuk mengurangi biaya produksi, yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan hasil panen. Hal ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan domestik, khususnya beras, yang merupakan komoditas utama dalam konsumsi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas dukungan teknis kepada petani, seperti pelatihan metodologi pertanian modern, pengenalan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, bersama dengan peningkatan pengelolaan output pertanian untuk meminimalkan kerugian pasca panen (Kementerian Pertanian, 2008).

Namun, terlepas dari upaya untuk meningkatkan produksi, tantangan yang ditimbulkan oleh pola cuaca yang tidak dapat diprediksi dan kerusakan lahan pertanian akibat bencana alam (seperti banjir dan kekeringan) menciptakan hambatan yang signifikan bagi banyak petani dalam meningkatkan hasil panen mereka. Akibatnya, sementara subsidi pupuk dapat bermanfaat, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berdampak pada produktivitas pertanian, seperti dampak perubahan iklim yang semakin parah (BPS, 2008).

Diversifikasi Makanan untuk Mengurangi Ketergantungan pada Beras

Sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan domestik, pemerintah juga melaksanakan kebijakan

diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada beras sebagai makanan pokok utama. Pada tahun 2008, pemerintah mulai mempromosikan konsumsi berbagai pilihan makanan lokal yang lebih luas, seperti jagung, ubi, singkong, dan sagu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada produksi beras sekaligus memperkenalkan sumber karbohidrat alternatif yang lebih ekonomis dan mudah diakses di berbagai wilayah (Badan Ketahanan Pangan, 2008).

Kebijakan tersebut mendapat dukungan komprehensif dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), yang melakukan kampanye untuk mengadvokasi konsumsi produk makanan lokal yang padat nutrisi. Program ini lebih lanjut didukung oleh pemerintah daerah, yang memfasilitasi pemasaran makanan lokal di pasar tradisional dan modern. Selain itu, pemerintah membantu petani lokal dalam membudidayakan komoditas pangan alternatif dengan menawarkan pelatihan dan teknologi pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Badan Ketahanan Pangan, 2008).

Diversifikasi pangan juga bercita-cita untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada komoditas pangan tunggal tetapi memiliki berbagai sumber pangan yang dapat diakses oleh penduduk di seluruh negeri. Ini tidak hanya menyajikan alternatif yang lebih sehat tetapi juga mengurangi konsekuensi dari krisis pangan global yang dapat mengganggu pasokan makanan tertentu. Selain itu, makanan lokal seringkali lebih ramah lingkungan dan lebih mudah diproduksi di daerah-daerah tertentu di Indonesia (Kementerian Pertanian, 2008).

Meningkatkan Infrastruktur dan Jaringan Distribusi Pangan

Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan infrastruktur distribusi pangan di seluruh Indonesia. Mengingat tantangan geografis dan alokasi pangan yang tidak

konsisten, pemerintah bekerja sama dengan otoritas lokal untuk membangun pasar baru dan meningkatkan jaringan distribusi logistik pangan yang menghubungkan daerah penghasil dengan konsumen. Inisiatif Infrastruktur Ketahanan Pangan juga mencakup pembangunan jalan raya dan sarana transportasi untuk memfasilitasi distribusi makanan ke daerah-daerah terpencil (Badan Pusat Statistik, 2008).

Pemerintah membangun 47 pasar induk baru dan 112 pasar perdesaan, serta menambah 25 gudang Bulog dengan kapasitas 350.000 ton di 15 provinsi (BPS, 2009). Pembangunan 1.850 km jalan baru di koridor distribusi pangan utama juga difokuskan untuk mengatasi disparitas akses antardaerah (Bappenas, 2008). Pemerintah juga bermitra dengan lembaga penanggulangan bencana, seperti BNPB, untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional dalam menghadapi situasi darurat. Cadangan pangan yang besar dapat memberikan jaminan dalam mengatasi krisis pangan yang muncul tiba-tiba sebagai konsekuensi dari bencana alam atau gangguan di pasar internasional (BNPB, 2008).

3. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis pangan

Eksekusi dan Penilaian Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Pada periode 2007–2008, Pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memitigasi dampak krisis pangan global. Salah satu kebijakan utama adalah meningkatkan impor beras guna menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, yang terdampak oleh melonjaknya harga komoditas internasional. Melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), pemerintah berhasil mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras pada awal 2008 sebagai upaya menjaga stabilitas harga di pasar domestik (BPS, 2008). Bulog juga menyebarluaskan beras ke pasar tradisional dan pasar modern di seluruh Indonesia untuk menjamin ketersediaan pasokan beras

di seluruh wilayah, terutama di daerah yang terkena dampak kekurangan pangan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah memperluas program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), yang menyediakan beras bersubsidi kepada lebih dari 15 juta rumah tangga miskin pada tahun 2008. Program ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang diprakarsai oleh pemerintah untuk meringankan beban individu yang kurang beruntung secara ekonomi yang terkena dampak kenaikan harga pangan. Program Raskin memastikan bahwa keluarga miskin masih dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih wajar meskipun harga pangan global melonjak (BPS, 2008).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempromosikan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok utama. Inisiatif ini dianjurkan melalui kampanye Gerakan Konsumsi Makanan Lokal, yang mendorong individu untuk mengonsumsi jagung, singkong, ubi, dan bahan makanan asli lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkenalkan variasi pangan dan memotivasi individu untuk mengurangi ketergantungan pada beras, terutama di tengah ketidakpastian mengenai pasokan beras internasional. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi benih dan pupuk kepada produsen pangan lokal, dalam rangka meningkatkan produksi komoditas tersebut (BPS, 2008).

Penilaian Pelaksanaan Kebijakan

Meskipun strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas pangan dalam jangka pendek, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah ketergantungan pada impor. Sementara impor beras mampu menstabilkan pasokan dan harga beras di pasar domestik, ketergantungan yang terus-menerus pada impor beras telah menjadi masalah struktural yang memerlukan penyelesaian.

Pada tahun 2008, Indonesia masih mengimpor 1,5 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang memperburuk beban anggaran negara untuk subsidi pangan (BPS, 2008). Hal ini menggarisbawahi perlunya memperkuat ketahanan pangan domestik untuk mencegah Indonesia menjadi terlalu bergantung pada pasokan asing, terutama di tengah volatilitas harga pangan global.

Program Raskin, meskipun memberikan bantuan penting kepada keluarga miskin, juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi dan efisiensi. Laporan dari BPS (2008) menunjukkan bahwa meskipun jumlah keluarga miskin yang menerima beras subsidi meningkat, ada beberapa masalah terkait distribusi beras yang tidak merata di daerah tertentu, mengakibatkan beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses bantuan ini segera atau dengan harga yang wajar. Ini menyoroti perlunya peningkatan dalam mekanisme distribusi bantuan pangan untuk memastikan efisiensi dan presisi yang lebih besar.

Sebagai strategi jangka panjang, diversifikasi pangan menunjukkan hasil yang belum merata. Walaupun beberapa daerah berhasil mendorong peningkatan konsumsi komoditas alternatif seperti jagung, singkong, dan ubi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Menurut data dari BPS (2008), sementara konsumsi pangan lokal sedang meningkat, transformasi pola konsumsi pangan secara keseluruhan masih sangat terbatas. Kecenderungan masyarakat menjadikan beras sebagai satu-satunya pangan pokok menjadi sebuah tantangan dalam menerapkan strategi diversifikasi.

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dalam jangka pendek, pendekatan pemerintah Indonesia memprioritaskan impor beras dan distribusi beras bersubsidi melalui program Raskin terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi yang timbul akibat kenaikan harga pangan.

Seperti dilansir BPS (2008), meskipun ada kenaikan harga pangan, khususnya beras, belum ada kerusuhan sosial yang mencolok seperti yang dialami di negara-negara lain yang terkena dampak krisis pangan global. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk memastikan pasokan pangan yang memadai dan mengatur distribusinya efektif dalam mengurangi ketegangan sosial.

Namun, dalam jangka panjang, kebijakan semacam itu tidak cukup untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada impor beras, meskipun dapat dikelola dalam situasi darurat, menyoroti kerentanan dalam sistem pertanian domestik yang terus bergantung pada pasokan asing. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, memperkuat sektor pertanian, dan mempromosikan diversifikasi pangan harus diabadikan dan diperkuat sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan (Hermanto & Saptana, 2018).

Evaluasi Infrastruktur dan Ketersediaan Pangan

Kebijakan distribusi pangan, termasuk penguatan infrastruktur penyimpanan dan sistem irigasi, menunjukkan kemajuan meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut laporan dari Kementerian Pertanian (2008), lebih dari 1.000 unit irigasi baru didirikan pada tahun 2008 untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan domestik. Peningkatan infrastruktur diantisipasi untuk mengurangi kerugian hasil pertanian dan memfasilitasi distribusi pangan, yang pada gilirannya berkontribusi untuk menstabilkan harga pangan.

Namun demikian, tantangan signifikan tetap ada mengenai pemeliharaan infrastruktur pertanian dan penyimpanan makanan yang ada. Sebagian besar fasilitas penyimpanan makanan di Indonesia tetap tidak memadai, mengakibatkan limbah dan kerugian karena

produk pertanian yang rusak. Pemerintah harus mengambil sikap yang lebih proaktif terhadap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, terutama dalam memastikan distribusi pangan yang lebih adil dan efisien di berbagai daerah.

4. Menilai Strategi Pemerintah Indonesia

Telaah Implementasi Kebijakan Pangan Pemerintah

Strategi yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia selama krisis pangan global 2007-2008 bertujuan untuk mengurangi eskalasi harga pangan yang dipicu oleh gangguan pasokan pangan internasional sambil secara bersamaan memastikan ketersediaan pangan domestik. Beberapa kebijakan signifikan yang diberlakukan selama periode ini meliputi peraturan impor pangan, subsidi pangan, dan inisiatif diversifikasi pangan. Secara kolektif, kebijakan ini berkonsentrasi pada penanganan ketahanan pangan dalam waktu dekat dan berusaha untuk merumuskan solusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan (Rusliyadi, 2021).

Salah satu kebijakan utama yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah peraturan impor beras. Pada tahun 2008, Indonesia mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras untuk mengelola kekurangan pasokan pangan domestik yang dipicu oleh kenaikan harga internasional dan gangguan hasil pertanian karena kondisi cuaca buruk. Data Badan Statistik Pusat (BPS) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berada di antara negara-negara penghasil beras terkemuka secara global, negara ini tetap sangat bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestiknya (BPS, 2008). Peraturan impor beras ini berfungsi untuk menstabilkan pasokan pangan dalam negeri dalam jangka pendek. Dengan mengimpor beras, pemerintah berhasil menghindari kelangkaan pangan yang dapat memicu lonjakan harga lebih lanjut, berdampak buruk pada masyarakat, terutama kelompok miskin yang paling terkena dampak kenaikan harga pangan.

Meskipun demikian, sementara regulasi impor beras efisien dalam jangka pendek, hal ini juga menggarisbawahi ketergantungan Indonesia pada pasokan asing. Ketergantungan ini dapat memperburuk tekanan pada anggaran negara dan menyebabkan Indonesia terjatuh dalam siklus ketergantungan pada negara lain untuk kebutuhan pangan mendasar. Salah satu tantangan signifikan dari kebijakan ini adalah kenyataan bahwa ketergantungan pada impor beras menghambat aspirasi Indonesia menuju swasembada pangan jangka panjang. Ketika harga pangan global meningkat atau ketegangan internasional mengganggu rantai pasokan, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Selain peraturan impor beras, pemerintah Indonesia juga melembagakan Program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) sebagai langkah untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak melonjaknya harga pangan. Program ini memberikan beras subsidi kepada lebih dari 15 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia pada tahun 2008 (BPS, 2008). Raskin bertujuan untuk menjamin bahwa keluarga berpenghasilan rendah dapat memperoleh makanan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mencegah mereka turun lebih jauh ke dalam kemiskinan sebagai konsekuensi dari krisis pangan. Program ini berhasil membantu banyak rumah tangga berpenghasilan rendah untuk bertahan selama krisis; Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama mengenai sistem distribusi dan kesulitan dalam menyalurkan data penerima (Faradilla et al., 2022).

Menurut laporan BPS (2008), meskipun distribusi yang luas terlibat dalam program Raskin, masih ada hambatan dalam pengiriman beras ke daerah terpencil. Daerah-daerah tertentu mengalami keterlambatan distribusi dan mengalami masalah lapangan yang menghambat beras subsidi untuk tiba dengan cepat atau konsisten. Ini menunjukkan bahwa sementara program ini sangat menguntungkan, infrastruktur distribusi dan sistem manajemen bantuan sosial memerlukan peningkatan untuk

memastikan bahwa bantuan pangan mencapai mereka yang membutuhkan secara tepat waktu dan efisien.

Selain kebijakan subsidi pangan, pemerintah juga berupaya menerapkan strategi diversifikasi pangan sebagai inisiatif jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada beras sebagai makanan utama. Pada tahun 2008, pemerintah mulai mengadvokasi konsumsi bahan makanan lokal seperti jagung, singkong, dan ubi. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi tekanan pada produksi beras domestik dan memperkenalkan sumber alternatif karbohidrat yang lebih ekonomis dan lebih sederhana untuk dibudidayakan secara lokal (Octania, 2021). Pemerintah juga berkolaborasi dengan produsen pertanian untuk memperkenalkan metodologi pertanian yang lebih berkhasiat dan mendiversifikasi komoditas pangan yang dapat dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan adalah modifikasi pola konsumsi individu yang sudah sangat bergantung pada beras sebagai komponen pangan utama. Menurut data dari BPS (2008), meskipun ada peningkatan konsumsi pangan lokal di daerah-daerah tertentu, tingkat adopsi dan perubahan pola konsumsi tidak berkembang secepat yang diantisipasi. Banyak konsumen terus menyukai beras sebagai makanan pokok mereka dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merangkul alternatif lain. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif sangat penting, mencakup modifikasi dalam pola konsumsi individu yang memerlukan waktu dan strategi yang lebih persuasif, serta inisiatif untuk mendidik masyarakat mengenai manfaat mengonsumsi makanan lokal yang lebih luas.

Refleksi Dampak Kebijakan

Kebijakan yang diberlakukan selama krisis pangan global 2007-2008 telah memberikan pengaruh yang relatif besar pada ketahanan pangan domestik, baik dalam jangka pendek

maupun panjang. Kebijakan impor beras dan distribusi beras bersubsidi dapat meringankan masalah krisis pangan dalam jangka pendek, dengan menstabilkan pasokan pangan dan mencegah kelangkaan pangan yang lebih parah. Namun, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak cukup untuk mendorong ketahanan pangan secara berkelanjutan. Ketergantungan pada impor beras dan distribusi subsidi yang tidak merata merupakan dilema struktural yang harus segera ditangani untuk mencegah Indonesia terjerat dalam siklus ketergantungan yang serupa di masa depan (Widiana et al., 2022).

Kebijakan diversifikasi pangan dan penguatan sektor pertanian domestik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia secara jangka panjang. Diversifikasi pangan dapat memperkaya sumber konsumsi dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan utama, seperti beras. Namun, untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia perlu melibatkan semua sektor, mulai dari badan pemerintah, petani, hingga masyarakat, untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal dan mendiversifikasi pola makan mereka. Hal ini memerlukan kebijakan yang lebih inklusif, bersama dengan upaya pendidikan yang intensif untuk mengubah persepsi individu tentang makanan lokal (Rahmanto et al., 2020).

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Raskin dan kebijakan subsidi pangan lainnya. Meskipun program ini menguntungkan banyak keluarga miskin, masih ada kekurangan dalam sistem distribusinya. Menurut laporan BPS (2008), program Raskin belum sepenuhnya efektif di daerah-daerah tertentu yang kekurangan infrastruktur distribusi yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kerangka distribusi dan administrasi dalam program bantuan sosial agar lebih efisien dan bertarget. Penilaian berkala kemandirian kebijakan dan sistem distribusi pangan harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa

kebijakan ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemandirian pangan harus tetap menjadi keharusan jangka panjang bagi Indonesia. Meskipun berbagai strategi jangka pendek telah dilembagakan untuk meringankan dampak krisis pangan, ketahanan pangan sejati hanya dapat diwujudkan dengan memperkuat sektor pertanian domestik dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Berinvestasi dalam inovasi pertanian, menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, dan memberi nasihat kepada petani tentang metodologi pertanian kontemporer dan berkelanjutan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Strategi pemerintah Indonesia selama krisis pangan global 2007-2008 menunjukkan reaksi yang kuat dan adaptif terhadap kenaikan harga pangan dan ketidakpastian pasokan domestik. Peraturan impor beras, inisiatif Raskin, dan program pangan bersubsidi terbukti efektif dalam mengurangi dampak krisis dalam jangka pendek, terutama dengan memastikan aksesibilitas pangan bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Namun demikian, meskipun efektif dalam konteks darurat, kebijakan ini juga mengungkapkan kerentanan struktural, seperti ketergantungan pada impor internasional dan tantangan distribusi yang tidak merata. Hal ini menggarisbawahi bahwa solusi jangka pendek saja tidak cukup untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sangat penting untuk berkonsentrasi pada strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, seperti diversifikasi pangan dan memperkuat sektor pertanian domestik. Inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada beras melalui konsumsi pangan lokal dan meningkatkan produktivitas pertanian harus diprioritaskan dalam mengamankan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Peningkatan infrastruktur distribusi pangan dan penilaian program bantuan sosial juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, sementara kebijakan ini menawarkan dukungan langsung yang vital selama krisis, Indonesia harus berusaha untuk melampaui ketergantungan struktural dan berinvestasi dalam ketahanan pangan jangka panjang yang lebih tangguh dan mandiri.

REFERENSI

- Abbott, P. C., & Borot de Battisti, A. (2011). Recent global food price shocks: causes, consequences and lessons for african governments and donors. *Journal of African Economies*, 20(suppl_1), 112-162. <https://doi.org/10.1093/JAE/EJR007>
- Ariningsih, E., & Rachman, H. P. (2008). Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), 239-255.
- Bappenas. (2008). *Laporan evaluasi program ketahanan pangan 2007-2008*.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2008). *Statistik perdagangan luar negeri indonesia 2008*. Badan Pusat Statistik.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2009). *Statistik infrastruktur pangan indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan (BKP). (2008). *Laporan diversifikasi pangan nasional 2008*. Badan Ketahanan Pangan.
- Badan Urusan Logistik (Bulog). (2008). *Laporan tahunan bulog 2008*. Badan Urusan Logistik.
- Fagi, A. M. (2013). Ketahanan pangan indonesia dalam ancaman. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 11-25.
- Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2023). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(2), 126-142. <https://doi.org/10.1108/jabes-06-2021-0066>
- Faradilla, C., Zulkarnain, Z., & Bagio, B. (2022). Analysis of aspects of food security: a strategic analysis of approach to sustainable food consumption patterns as an effort to realize food policy in indonesia. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 2(4), 601-610. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i4.399>
- Farouk, S., & Cliche, L. (2011). The 2008 food and financial crises and the south: causes and impacts. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 26(1-2), 22-48.
- Gliessman, S. (2022). Why is there a food crisis?. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 46(9), 1301-1303. <https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2115187>
- Golay, C. (2010). The food crisis and food security: Towards a new world food order? (No. 1, pp. 215-232). *Institut de hautes études internationales et du développement*. <https://doi.org/10.4000/POLDEV.145>
- Ghuri, F. N. (2009). World food crisis: causes, trends and strategy. *iBT Journal of Business Studies (JBS)*, 5(1), 51-56. <https://doi.org/10.46745/ILMA.JBS.2009.05.01.05>
- Hadistio, A., Jumiono, A., & Fitri, S. (2019). Tepung mocaf (modified cassava flour) untuk ketahanan pangan indonesia. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 1(1), 113-17. <https://doi.org/10.30997/jiph.v1i1.2005>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2008). *Laporan tahunan kementerian pertanian 2008*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2008). *Laporan Tahunan kementerian pertanian 2008*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2008). *Laporan kinerja program raskin 2008. kementerian sosial republik indonesia*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lang, T. (2010). Crisis? what crisis? the normality of the current food crisis. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 87-97. <https://doi.org/10.1111/J.1471-0366.2009.00250.X>

- Neilson, J., & Arifin, B. (2013). Food security and the de-agrarianization of the Indonesian economy. In *Food Systems Failure* (pp. 147-165). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776820-18>
- Octania, G. (2021). *The Government's role in the Indonesian rice supply chain* (No. 32). Policy Paper.
- Van Der Ploeg, J. D. (2010). The food crisis, industrialized farming and the imperial regime. *Journal of Agrarian change*, 10(1), 98-106. <https://doi.org/10.1111/J.14710366.2009.00251.X>
- Rachmaningsih, T., & Priyarsono, D. S. (2012). Ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 1.
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. (2020). *Food Diversification: Strengthening Strategic Efforts to Reduce Social Inequality through Sustainable Food Security Development in Indonesia*. 33-44 <https://doi.org/10.20961/CARAKATANI.V36I1.41202>
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>
- Rusliyadi, M. (2021). *The role of the institutional, assistance, and source information analysis on food security and extension policy: case in Indonesia. in precision agriculture technologies for food security and sustainability* (pp. 275-290). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5000-7.CH012>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Schmitz, P. M., & Kavallari, A. (2009). Crop plants versus energy plants—on the international food crisis. *Bioorganic & medicinal chemistry*, 17(12), 4020-4021. <https://doi.org/10.1016/J.BMC.2008.11.041>
- Setiawan, E., Hartoyo, S., Sinaga, B. M., & Hutagaol, M. P. (2016). Impact of rice import tariff and quota on food security in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 28(2), 220-232.
- Sharma, S. D. (2009). The other global crisis: Combating the food and humanitarian crisis. *International Journal*, 64(2), 501-520. <https://doi.org/10.1177/002070200906400210>
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19: telaah kritis terhadap rencana megaproyek lumbung pangan nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 184-204.
- Sundaram, A. (2013). The global food crises. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*.
- Suryana, A. (2014). Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), pp. 123-135).
- Widiana, A., Wijaya, C., & Atmoko, A. W. (2022). The challenges of food security policy in Indonesia: lesson learned from Vietnam, India, and Japan. *Technium Soc. Sci. J.*, 33, 1. <https://doi.org/10.47577/tssj.v33i1.6937>